

RINGKASAN

ERNIA HAFIZAH SIMAMORA
NIM: 210510095

**PENERAPAN SANKSI DISIPLIN
TERHADAP NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN
TATA TERTIB DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
(Studi Penelitian di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A
Lhokseumawe)**

(Dr. Muhammad Nasir S.H., LL.M. dan Dr. Yusrizal S.H., M.H)

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan adalah untuk memberikan jaminan dalam pelaksanaan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan membagi hukuman disiplin menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas II A Lhokseumawe, untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas II A Lhokseumawe.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggambarkan dan menelaah seperti mengkritik kemudian membuat suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas II A Lhokseumawe belum dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah petugas keamanan, serta kurangnya minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas II A Lhokseumawe yaitu dengan cara memperluas area Lapas untuk menambah ruangan sel.

Disarankan kepada Pihak Lapas kelas II A Lhokseumawe harus lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi disiplin terhadap narapidana, pihak Lapas Kelas II A Lhokseumawe perlu menambah petugas keamanan dan diharapkan dapat memperluas area Lapas guna menyediakan ruang sel yang lebih memadai.

Kata Kunci: Penerapan, Hukuman Disiplin, Narapidana

SUMMARY

ERNIA HAFIZAH SIMAMORA
Nim: 210510095

**IMPLEMENTATION OF
DISCIPLINARY SANCTIONS
AGAINST PRISONERS WHO
VIOLATE RULES IN
CORRECTIONAL INSTITUTIONS
(Research Study at Class II A
Lhokseumawe Penitentiary)**

(Dr. Muhammad Nasir S.H., LL.M. dan Dr. Yusrizal S.H., M.H)

The issuance of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning the Rules of Procedure for Correctional Institutions and Detention Centers aims to guarantee the implementation of disciplinary sanctions in correctional institutions. Correctional institutions are part of the Indonesian criminal justice system responsible for providing guidance to inmates. The correctional institution divides disciplinary punishments into three levels: light, moderate, and severe. The purpose of this study is to determine how disciplinary sanctions are applied to inmates who violate rules of procedure at the Class II A Lhokseumawe Prison. This study also examines the obstacles encountered and the efforts made to overcome these obstacles.

This research uses an empirical juridical method. The data sources used consist of primary and secondary data. Data collection techniques in this research were conducted through field research and library research. The data analysis techniques used were descriptive and analytical, such as criticizing, and then drawing conclusions.

The results of this research indicate that the implementation of disciplinary sanctions against inmates who violate rules and regulations at the Class II A Lhokseumawe Penitentiary has not been carried out in accordance with established regulations. Obstacles encountered include a shortage of security officers and a lack of inmate interest in participating in the rehabilitation program. Efforts to overcome these obstacles in implementing disciplinary sanctions against inmates who violate rules and regulations at the Class II A Lhokseumawe Penitentiary include expanding the prison area to add more cell space.

It is recommended that the Class II A Lhokseumawe Penitentiary be more assertive in implementing disciplinary sanctions against inmates. The Class II A Lhokseumawe Penitentiary needs to add more security officers and is expected to expand the prison area to provide more adequate cell space.

Keywords: *Implementation, Disciplinary Punishment, Prisoners*